

MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH

Sonny Muhammad Ikhsan Mangkuwi

Magister Administrasi Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Almuslim Bireuen

Masyrida

Magister Administrasi Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Almuslim Bireuen

masyridas@gmail.com

Muhammad Bahtiar

Magister Administrasi Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Almuslim Bireuen

bahtiarksp@gmail.com

Nora Silvia

Magister Administrasi Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Almuslim Bireuen

norasilvia1910@gmail.com

Abstract: *According to this study, the final decision is made by the foundation's leadership after school stakeholders participate in the preparation of the RAPBS (Annual Budget Plan) for education at the end of each year. The organisational structure, headed by the school principal and the foundation chairperson, functions as a mechanism for allocating funds for education. School activities, capital expenditures, purchases of products and services, and human resource development—particularly for teachers—are all funded by this budget. The Indonesian Community Care Foundation and the education department conduct oversight, while the School Committee and the foundation are responsible. In educational institutions, effective, transparent, and open financial management is recognised as having a positive impact on improving educational standards.*

Keywords: *Management, Education Funding, School Education Quality.*

Abstrak : Menurut penelitian ini, keputusan akhir diambil oleh pimpinan yayasan setelah para pemangku kepentingan sekolah berpartisipasi dalam penyusunan RAPBS perencanaan anggaran pendidikan pada akhir setiap tahun. Struktur organisasi yang dikepalai oleh kepala sekolah dan ketua yayasan berfungsi sebagai mekanisme pengalokasian dana untuk pendidikan. Kegiatan sekolah, belanja modal, pembelian produk dan layanan, serta pengembangan sumber daya manusia—khususnya guru—semuanya didanai oleh anggaran tersebut. Yayasan Peduli Ummat Indonesia dan dinas pendidikan melakukan pengawasan, sedangkan Komite Sekolah dan yayasan

bertanggung jawab. Pada lembaga pendidikan, pengelolaan keuangan yang efektif, transparan, dan terbuka diakui memiliki dampak positif terhadap peningkatan standar pendidikan.

Kata Kunci: Manajemen, Pembiayaan Pendidikan, Mutu Pendidikan Sekolah.

PENDAHULUAN

Pertimbangan biaya sangat penting bagi kemajuan pendidikan. Bahkan, pemikiran semacam itu akan muncul ketika mempertimbangkan bagaimana meningkatkan pengembangan pendidikan, khususnya yang terkait dengan isu kualitas, pemerataan, efisiensi, dan relevansi pendidikan (Ekowati dkk., 2019). Kesadaran akan pentingnya biaya pendidikan ini tidak hanya terbatas pada keputusan presiden atau pemerintah dalam menentukan besaran biaya pengembangan pendidikan dalam APBN setiap tahunnya. Komponen biaya akan selalu terkait dengan semua pemikiran tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kekuatan ekonomi suatu negara akan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi bagaimana sumber dana pendidikan dialokasikan serta kebijakan yang diambil dan dijalankan oleh negara tersebut. Dengan demikian, biaya pendidikan merupakan komponen penting dalam meningkatkan standar pendidikan dan memenuhi peran pendidikan dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia (Kurniady et al., 2018).

Tingkat makro (seperti tingkat nasional) maupun mikro (seperti satuan pendidikan), keterkaitan antara berbagai komponen merupakan aspek yang kompleks dari pembiayaan pendidikan secara umum (Nurhayati et al., 2022). Hal ini mencakup sumber pendanaan pendidikan, proses dan prosedur pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi penggunaannya, serta akuntabilitas hasil yang ditentukan oleh penyesuaian yang dilakukan di semua tingkatan, khususnya di sekolah. Selain itu, sejumlah isu yang berkaitan dengan pendanaan pendidikan harus diperhatikan. Diperlukan studi khusus untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pembiayaan pendidikan karena kompleksitasnya.

Manajemen keuangan merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan baik di tingkat makro (nasional) maupun mikro (kelembagaan) dan harus terus ditingkatkan (Ekowati dkk., 2019). Dalam konteks lembaga atau organisasi, sekolah setiap tahun menyusun RAPBS (Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) yang berisi tentang alokasi dana untuk keperluan operasional. Perencanaan dan pemanfaatan biaya tersebut menjadi salah satu contoh penerapan manajemen

keuangan dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, manajemen keuangan sangat penting untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu di semua jenjang pendidikan (Fadillah dkk., 2015).

Interaksi yang rumit antara sejumlah faktor, baik di tingkat makro maupun mikro, seperti sumber pendanaan, skema alokasi kas, serta efektivitas dan efisiensi penerapannya, menjadi ciri khas pembiayaan pendidikan (Rusdiana, 2021). Dari perspektif manajerial, kepala sekolah memegang peranan penting dalam memahami tugas dan prosedur yang terlibat dalam pengelolaan dana pendidikan, seperti membuat RKAS dan mengatur serta mengawasi penggunaan dana tersebut. Pemenuhan persyaratan pendidikan nasional, yang juga diharapkan dapat dicapai dengan mengalokasikan dana seefisien mungkin sambil memiliki pemahaman yang kuat tentang proses pengelolaan keuangan, merupakan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Terkait Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, selain pemerintah, pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam pendanaan pendidikan (Inkiriwang, 2020). Namun, masih terdapat sejumlah permasalahan dalam pendanaan pendidikan, seperti ketidakjelasan pengelolaan keuangan sekolah yang dapat mengakibatkan perilaku tidak etis. Secara teknis, penanganan pendanaan pendidikan oleh sekolah swasta sering kali berbeda dengan sekolah negeri. Sekolah negeri sering kali menghadapi kendala keterlambatan pencairan anggaran BOS yang sering kali mengganggu operasional sekolah.

METODE PENELITIAN

Peneliti dapat menghubungkan kebijakan pemerintah di tingkat makro dengan pelaksanaannya di tingkat mikro di sekolah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus dalam penelitiannya tentang manajemen pembiayaan pendidikan. Sementara teknik kualitatif memungkinkan deskripsi dan analisis mendalam tentang peristiwa, perilaku, dan sikap individu dan kelompok, pendekatan deskriptif digunakan untuk menyajikan gambaran metodis dan akurat tentang fenomena yang telah diamati. Alat penelitian meliputi dokumentasi, wawancara, dan pengamatan langsung di sekolah untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana anggaran dialokasikan dan dilaksanakan.

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data konkret yang mendukung temuan pengamatan dan wawancara. Yayasan, kepala sekolah, komite sekolah, dan orang tua berpartisipasi dalam proses wawancara selama prosedur penelitian, yang dilakukan di lembaga pendidikan pada bulan Oktober 2023.

Pendekatan penelitian ini memadukan sejumlah metode pengumpulan data, meliputi dokumentasi, observasi, dan wawancara (Sugiyono, 2013). untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan. Observasi langsung dilakukan untuk memahami pelaksanaan dan pengalokasian anggaran, dan wawancara dengan berbagai pihak terkait dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dan terkonfirmasi. Hasil observasi dan wawancara didukung oleh dokumentasi, yang meliputi informasi konkret seperti profil sekolah, visi dan misi, data siswa dan tenaga kependidikan, fasilitas sekolah, dan RKAS. Peneliti dapat menyelidiki bagaimana kebijakan pemerintah dilaksanakan di tingkat sekolah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, yang menawarkan pemahaman yang mendalam tentang pengelolaan keuangan pendidikan dalam suatu lingkungan tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

Sekolah membuat program-program yang akan dimasukkan ke dalam RKAS karena sekolah merupakan salah satu lokasi kegiatan belajar mengajar resmi dan tentunya ingin memberikan pendidikan yang bermutu. RKAS memberikan informasi tentang program kegiatan sekolah serta sumber pendanaan dan rincian dana yang dibutuhkan untuk melaksanakannya. Sistem penganggaran yang digunakan lebih mirip dengan Sistem Perencanaan Pemrograman dan Penganggaran (PPBS) dibandingkan dengan enam sistem penganggaran lainnya. Menurut Arifudin dkk. (2021), PPBS merupakan teknik metodis yang bertujuan untuk menetapkan tujuan, membuat program yang akan dicapai, menentukan biaya dan alternatif, serta menggunakan prosedur penganggaran yang memperhitungkan kegiatan program jangka panjang. Sistem penganggaran ini memiliki manfaat sebagai berikut: (i) Mempermudah manajemen tingkat menengah untuk mengambil alih tanggung jawab dari manajemen tingkat atas; (ii) Pada akhirnya dapat meringankan beban kerja; dan (iii) Menghilangkan program yang mengganggu atau tumpang tindih dengan pencapaian tujuan organisasi.

Pengorganisasian Pembiayaan Pendidikan

Pengelolaan atau pendokumentasian arus masuk dan arus keluar dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan pendidikan dalam rangka pengumpulan informasi mengenai pengelolaan anggaran pendidikan berbasis akuntansi dikenal dengan istilah penataan pembiayaan atau keuangan pendidikan. Mengingat besarnya manfaatnya dalam konteks kebijakan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengguna dana pendidikan, kegiatan ini perlu diperhatikan secara saksama. Menurut Atmaja dkk. (2016), setidaknya ada tiga langkah krusial yang perlu dilakukan dalam rangka penataan dan pengelolaan anggaran pendidikan, yaitu: pendataan dan pelaporan keuangan pendidikan, pembukuan pelaksanaan anggaran pendidikan, serta pembagian tugas dan kewenangan keuangan yang jelas.

Sekolah juga sudah mampu menetapkan anggaran untuk biaya rutin dan tidak rutin, serta biaya pengembangan. Kegiatan pengumpulan data ini meliputi identifikasi dan pengukuran data keuangan, pencatatan dan kategorisasi data keuangan, serta pelaporan keuangan kepada pemangku kepentingan. Pencarian data keuangan pendidikan merupakan proses terperinci yang didokumentasikan dalam buku atau buku harian untuk jangka waktu tertentu secara kronologis dan metodis. Berbagai faktur, kwitansi, dan nota yang relevan yang telah disetujui oleh orang yang berwenang untuk menerbitkannya harus disertakan pada setiap pencatatan. Proses penataan dana pendidikan di sekolah telah dilaksanakan secara optimal, berdasarkan hasil temuan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hal ini meliputi inventarisasi sumber dana pendidikan, perhitungan besaran anggaran, analisis, dan alokasi.

Pihak-pihak terkait telah mengetahui data keuangan pendidikan yang telah dikumpulkan, dikategorikan, dan dirangkum di Sekolah dalam konteks pembukuan dan pencatatan dalam teknik akuntansi. Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan dipatuhi saat pelaporan. Laporan keuangan biasanya perlu dipelajari dan ditafsirkan agar dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Membuat hubungan antara angka-angka dalam laporan keuangan dengan angka-angka lainnya dikenal sebagai analisis laporan keuangan. Proses pengorganisasian dipermudah dengan fakta bahwa bendahara sekolah dan yayasan telah memiliki keterampilan yang diperlukan, menurut temuan wawancara dan pengamatan.

Pengumpulan data dan pelaporan keuangan harus diselesaikan sebelum beralih ke aspek kedua pengorganisasian dalam konteks administrasi atau pembukuan untuk

pelaksanaan pendidikan. Kegiatan yang berkaitan dengan penerapan metode akuntansi, seperti mendokumentasikan, mengkategorikan, dan meringkas berbagai jenis transaksi keuangan yang beredar, dikenal sebagai kegiatan pembukuan. Selain pencatatan akuntansi, hal ini juga melibatkan audit, penyusunan laporan, interpretasi laporan, dan kegiatan lainnya. Dengan demikian, akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan.

Buku kas umum tabularis dan skontro kas umum terbuka merupakan dua buku yang dapat digunakan untuk mendukung tugas-tugas akuntansi tersebut. Informasi yang dihasilkan oleh kegiatan administrasi keuangan instruksional dimaksudkan agar mudah dibaca dalam semua bentuk pembukuan yang digunakan dalam akuntansi. Oleh karena itu, seorang profesional dengan pengetahuan akuntansi harus mencatat keuangan pendidik. Menetapkan kriteria pelaporan ini berdasarkan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi untuk memudahkan pemangku kepentingan dalam memeriksa hasil pembukuan.

Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan

Standar yang ditetapkan dapat kita bandingkan dengan pelaksanaan yang sebenarnya ketika menilai pengelolaan pembiayaan pendidikan . Oleh karena itu, ada atau tidaknya ketidaksesuaian antara pedoman standar biaya minimal yang berlaku saat ini dengan pelaksanaan itu sendiri dapat dilihat dari cara pengelolaan pembiayaan pendidikan yang dilaksanakan di sana. Kajian ini mengacu pada norma pengelolaan pembiayaan pendidikan yang berlandaskan pada Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2009 dan menggunakan acuan baku. Peraturan tersebut menguraikan ketentuan jumlah rombongan belajar per sekolah/program keahlian dan jumlah peserta didik per rombongan belajar untuk perhitungan biaya operasional nonpersonalia. Terdapat pula standar biaya operasional nonpersonalia untuk Sekolah.

Sekolah telah memenuhi persyaratan belanja operasional nonpersonalia yang melampaui batas minimal yang ditetapkan, sesuai dengan informasi di atas. Terlihat bahwa Sekolah dapat menggunakan keuangan secara efektif dan ekonomis, meskipun belanja operasional nonpersonalianya sangat tinggi. Hal ini terlihat dari prasarana, fasilitas, dan kondisi umum sekolah yang sangat memadai dan mendukung pembelajaran siswa.

Pengawasan Pembiayaan Pendidikan

Pemanfaatan dana untuk suatu tujuan tertentu erat kaitannya dengan pembahasan manajemen, khususnya manajemen keuangan. Setiap lembaga di setiap industri pasti akan menghadapi kesulitan keuangan karena terhambat oleh masalah pendanaan dan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya dana. Untuk menganggarkan sebagian kebutuhan suatu lembaga, diperlukan berbagai macam dana. Ini merupakan salah satu lembaga yang membutuhkan dana untuk dapat beroperasi.

Sekolah ini sendiri memiliki metode untuk mencegah penyalahgunaan keuangan publik atau pemerintah. Dapat dikatakan bahwa Sekolah tersebut mengelola dananya dengan cara yang sangat transparan. Kegiatan seperti rapat terbuka yang melibatkan proses penganggaran untuk dana pendidikan, yang dihadiri oleh semua warga sekolah, termasuk mereka yang tergabung dalam komite sekolah, menjadi contoh transparansi ini. Selain itu, menerima masukan dari orang tua siswa, yang dapat dikirimkan langsung ke komite sekolah atau kepala sekolah. Orang tua siswa yang ingin mengetahui secara spesifik tentang keuangan atau bagaimana uang yang mereka sumbangkan untuk digunakan dapat melakukannya melalui sekolah itu sendiri.

Penjelasan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa manajemen pencegahan korupsi di Sekolah merupakan wujud keterbukaan atau transparansi organisasi dalam hal pengelolaan keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan memberikan informasi kepada orang tua siswa tentang sumber dana dan penggunaan dana oleh Sekolah tersebut. Hasil rapat RKAS kemudian dipajang di hadapan seluruh peserta, informasi tentang pengelolaan dana di majalah dinding sekolah, dan disediakan kotak saran bagi orang tua dan guru yang ingin menyampaikan keluhan atau saran terkait keuangan atau pengeluaran sekolah.

Manajemen pembiayaan yang baik, terbuka dan transparan berpengaruh terhadap mutu atau kualitas Pendidikan terkait mutu pendidikan, tidak dapat dipungkiri bahwa segala sesuatu akan dinilai berdasarkan mutu lulusannya. Menurut Arfiah dan Sumardjoko (2017), mutu pendidikan mencakup pengetahuan, kemampuan, serta sikap/mentalitas lulusan. Namun, menurut Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) 2020, diperlukan proses pembelajaran yang kuat untuk menghasilkan lulusan yang bermutu. Guru yang baik sangat penting bagi keberhasilan proses pembelajaran. Selain itu, diperlukan manajemen yang efektif—termasuk manajemen keuangan—untuk menghasilkan guru yang bermutu. Dengan demikian, setiap elemen

berkontribusi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa, meskipun tidak secara langsung, manajemen keuangan yang baik dapat membantu meningkatkan mutu Pendidikan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengelolaan dana pendidikan mencakup sejumlah elemen penting. Guru masih memiliki kecenderungan membuat anggaran secara berulang, meskipun proses perencanaan dan penganggaran dilakukan melalui Rapat Kerja Tahunan dan penyusunan rancangan anggaran dengan melibatkan pemangku kepentingan sekolah. Kedua, bendahara yayasan dan kepala sekolah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan, dan sistem pengalokasian dana dan sumber daya manusia diatur secara metodelis.

Ketiga, pelaksanaan anggaran dimanfaatkan untuk berbagai inisiatif pengembangan sekolah serta perolehan produk dan layanan, dengan penekanan pada peningkatan keterampilan guru dan infrastruktur serta fasilitas pendidikan. Keempat, Komite Sekolah, Yayasan, dan Dinas Pendidikan diberi akuntabilitas, sedangkan yayasan dan dinas pendidikan melakukan pemantauan. Kelima, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, prestasi siswa, dan kompetensi tim pengajar semuanya menunjukkan bagaimana pengelolaan keuangan yang terorganisasi dengan baik telah meningkatkan kualitas pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiah, S., & Sumardjoko, B. (2017). Penguatan karakter tanggung jawab dan kemandirian pada mahasiswa ppkn melalui perkuliahan kepramukaan dalam upaya mempersiapkan mutu lulusan sebagai pembina ekstrakurikuler di sekolah. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 27(2), 76–92.
- Arifudin, M., Sholeha, F. Z., & Umami, L. F. (2021). Planning (Perencanaan) Dalam Manajemen Pendidikan Islam. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(02), 162–183.
- Atmaja, R. M. T. E., Harun, C. Z., & Ibrahim, S. (2016). Analisis Penetapan Standar Biaya Pendidikan Pada SMA Negeri 2 Kuala Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Administrasi Pendidikan: Program Pascasarjana Unsyiah*, 4(1).
- Banjarnahor, S., & Daryanto, E. (2023). Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Pengelolaan Keuangan yang Efisien: Studi Kasus di TK Santa Lusya. *JOURNAL OF DIGITAL LEARNING AND DISTANCE EDUCATION*, 2(6).

- Ekowati, E. T., Sunandar, S., & Murniati, N. A. N. (2019). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Sekolah Dasar Islam Ar Rahmah Kecamatan Suruh. *Jurnal Manajemen Pendidikan (JMP)*, 8(1).
- Fadillah, N., AGUNG, D. R. A. A. G., & YUDANA, D. R. I. M. (2015). Analisis Biaya Pendidikan Dan Hubungannya Dengan Mutu Pendidikan Pada SMP Negeri 2 Sukasada Tahun Pelajaran 2013/2014. *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*, 6(1).
- Inkiriwang, R. R. (2020). Kewajiban negara dalam penyediaan fasilitas pendidikan kepada masyarakat menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. *Lex Privatum*, 8(2).
- Kurniady, D. A., Setiawati, L., & Nurlatifah, S. (2018). Manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu sekolah menengah kejuruan. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 17(3), 263–269.
- Nurhayati, N., Nasir, M., Mukti, A., Safri, A., Hasibuan, L., & Anwar, K. (2022). Manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 594–601.
- Piliang, Y. A. (2010). *Semiotika dan Hipersemiotika: Kode, Gaya, dan Matinya Makna*. Matahari.
- Rusdiana. (2021). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Filosofi, Konsep, dan Aplikasi*. TRESNA BHAKTI Press Bandung.
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta.